



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**



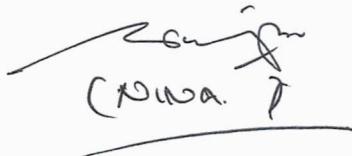
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 - Telp. (0411) 436937
Makassar 90231

Tgl 29/1/2023.


Ranijan
(Dina)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien didasari atas buah pikiran yang melatarbelakangi adanya keinginan untuk melaksanakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki tiga pilar utama :

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Partisipatif

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu serta tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Adapun Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan mengenai :

1. Penetapan secara jelas, tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
2. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh Pemerintah Daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Adapun Laporan Keuangan Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Juga diupayakan fungsi pengawasan eksternal dan internal, harus “sama-sama kuat” agar fungsi *check* dan *balances* dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dapat sejalan dan laporan keuangan ini tersusun sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan pendapatan tahun 2022 dengan realisasinya. Realisasi pendapatan pada TA. 2022 adalah sebesar Rp. 26.360.000,00 atau 97,77% dari anggarannya Rp. 26.960.000,00. Realisasi belanja pada TA. 2022 adalah sebesar Rp. 62.878.889,00 atau mencapai 93,39%, dari anggarannya Rp. 59.835.877.467,00.

2. NERACA

Dilihat dari posisi laporan keuangan Bappelitbangda Prov. Sulsel dapat dilaporkan sbb:

- Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.087.196.605,48 yang terdiri dari :
 - aset lancar sebesar Rp. 9.217.675,00
 - aset tetap sebesar Rp. 14.536.322.081,16
 - aset lainnya sebesar Rp. 541.656.849,32

Jumlah Aset Rp. 15.087.196.605,48

- Kewajiban jangka Pendek per 31 Desember 2022 terdiri dari:
 - Utang Beban Rp. 1.337.750.950,00
- Ekuitas per 31 Desember 2022 terdiri dari:
 - Ekuitas Rp. (44.022.804.601,14)
 - RK PPKD Rp. 57.772.250.256,62

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. 15.087.196.605,48

3. LAPORAN OPERASIONAL

Posisi Keuangan Balitbangda Prov. Sulsel dari sisi Beban dan Pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 26.360.000,00
 - Beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 60.947.739.275,45
- Jumlah Surplus/Defisit sebesar Rp. (60.921.379.275,45)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Posisi Perubahan Ekuitas Balitbangda Prov. Sulsel sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp. (20.384.416.033,37)
- Surplus/Defisit	Rp. (60.921.379.275,45)
- Rekening Konsolidasi (RK)	Rp. 37.136.560.799,38
- Koreksi penyusutan aset tetap	Rp. 146.429.908,29
- Koreksi penyusutan aset lainnya	Rp. 0,01
- Ekuitas Akhir	Rp. (44.022.804.601,14)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Satuan Kerja yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, 30 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg
NIP. 1967.0427.199303.1.015

DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN EKSEKUTIF	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
NERACA SALDO	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN	
PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	5
2.1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Target Kinerja Keuangan	5
2.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang	
Telah Ditetapkan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	12
BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	13
3.1. Rincian dan Penjelasan dari Masing-masing Pos-pos Pelaporan	
KeuangaN	13
3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul	
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan	
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.....	29
BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-	
KEUANGAN OPD	31
4.1. Struktur Organisasi	31
4.2. Tugas dan Fungsi	31
4.3 Sumber Daya	32
BAB V. PENUTUP	33
LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi (Bappelitbangda) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca
3. Neraca Saldo
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Perubahan Ekuitas,
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan Berbasis Akrual.

Lampiran Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi (Bappelitbangda) untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana di atas merupakan mutlak tanggung jawab kami.

Makassar, 30 Desember 2022

**KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19670427 199303 1 015



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN 2	ANGGARAN 2022 3	REALISASI 2022 4	(%) 5	REALISASI 2021 6
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	26.960.000,00	26.360.000,00	97.77	27.160.000,00
2					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.960.000,00	26.360.000,00	97.77	27.160.000,00
4	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	26.960.000,00	26.360.000,00	97,77	27.160.000,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
15					
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
19					
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00

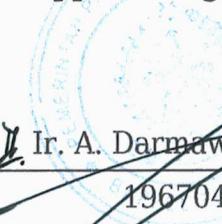
NO	URAIAN 2	ANGGARAN 2022 3	REALISASI 2022 4	(%) 5	REALISASI 2021 6
23					
24	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah	26.960.000,00	26.360.000,00	97.77	27.160.000,00
30					
31	BELANJA DAERAH	62.878.889.896,00	58.723.986.099,00	93,39	59.835.877.467,00
32					
33	BELANJA OPERASI	61.769.832.896,00	57.737.179.338,00	93,47	57.984.652.267,00
34	Belanja Pegawai	28.954.033.106,00	28.676.290.780,00	99,04	29.377.678.615,00
35	Belanja Barang dan Jasa	32.815.799.790,00	29.060.888.558,00	88,56	28.606.973.652,00
36	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00
41	BELANJA MODAL	1.109.057.000,00	986.806.761,00	88,98	1.851.225.200,00
42	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	944.057.000,00	872.831.961,00	92,46	1.299.241.200,00
44	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	115.000.000,00	113.974.800,00	99,11	303.934.000,00
45	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Modal - Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	-100,00	248.050.000,00
48		0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
49		0,00	0,00	0,00	0,00
50	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
51		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
53		0,00	0,00	0,00	0,00
54		0,00	0,00	0,00	0,00
55	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
60					
61	Jumlah	62.878.889.896,00	58.723.986.099,00	93,39	59.835.877.467,00
62					
63	Surplus/(Defisit)	(62.851.929.896,00)	(58.697.626.099,00)	93,39	(59.808.717.467,00)
64					
65	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
67	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
75	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0.00	0,00
76					
77	Jumlah	0,00	0,00	0.00	0,00
78					
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0.00	0,00
80	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0.00	0,00
81	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	0,00	0,00	0.00	0,00
82	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0.00	0,00
83	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0.00	0,00
84					
85	Jumlah	0,00	0,00	0.00	0,00
86					
87	Pembiayaan neto	0,00	0,00	0.00	0,00
88					
89	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi	(62.851.929.896,00)	(58.697.626.099,00)	98.14	(59.808.717.467,00)
90	Koreksi Silpa	0,00	0,00	0.00	0,00
91	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0.00	0,00

Makassar, 30 Desember 2022

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan



Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg
196704271993031015



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	2	3	4
1	ASET	15.087.196.605,48	17.906.346.218,01
2	ASET LANCAR	9.217.675,00	102.073.242,73
3	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	0,00	0,00
7	Kas di BOS	0,00	0,00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
9	Investasi dalam Saham	0,00	0,00
10	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
11	Piutang Pajak	0,00	0,00
12	Piutang Retribusi	0,00	0,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
14	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
15	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
16	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
18	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
19	Uang Muka	0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
21	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
22	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
23	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
24	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
25	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
26	Piutang Lainnya	0,00	0,00
27	Piutang Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
28	Perseediaan	0,00	0,00
29	Jumlah Aset Lancar	9.217.675,00	102.073.242,73
30			
31	Investasi Nonpermanen		
32	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
33	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
34	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
35	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
36	Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
37	Investasi Permanen		
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
39	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
40	Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00
41	Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
42	ASET TETAP		
43	Tanah	14.536.322.081,16	15.922.755.004,98
44	Peralatan dan Mesin	534.597.040,00	534.597.040,00
45	Gedung dan Bangunan	19.206.007.920,00	18.692.675.959,00
		9.496.311.338,40	10.453.868.448,40

NO	URAIAN	2022	2021
1	2	3	4
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan	943.859.700,00	943.859.700,00
47	Aset Tetap Lainnya	1.328.977.850,00	1.328.977.850,00
48	Konstruksi dalam Pengerjaan	89.299.500,00	0,00
49	Akumulasi Penyusutan	(17.062.731.267,24)	(16.031.223.992,42)
50	Jumlah Aset Tetap	14.536.322.081,16	15.922.755.004,98
51			
52	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
53	ASET LAINNYA	0,00	0,00
54	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
55	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
56	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	525.800.000,00	525.800.000,00
57	Aset Tak Berwujud	1.626.322.000,00	1.626.322.000,00
58	Aset Lain-lain	58.244.500,00	58.244.500,00
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.668.709.650,68)	(328.848.529,70)
60	Jumlah Aset Lainnya	541.656.849,32	1.881.517.970,30
61			
62	JUMLAH ASET	15.087.196.605,48	17.906.346.218,01
63			
64	KEWAJIBAN	1.337.750.950,00	1.154.201.452,00
65			
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.337.750.950,00	1.154.201.452,00
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	0,00	0,00
68	Utang Bunga	0,00	0,00
69	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
70	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
71	Utang Beban	1.337.750.950,00	1.154.201.452,00
72	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
73	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.337.750.950,00	1.154.201.452,00
74			
75	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
76	Utang Jangka Panjang Non Perbankan	0,00	0,00
77	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
78	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
79	JUMLAH KEWAJIBAN	1.337.750.950,00	1.154.201.452,00
80	EKUITAS	13.749.445.655,48	16.752.144.766,01
81	Ekuitas	(44.022.804.601,14)	(20.384.416.033,37)
82	RK PPKD	57.772.250.256,62	37.136.560.799,38
83	JUMLAH EKUITAS	13.749.445.655,48	16.752.144.766,01
84			
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	15.087.196.605,48	17.906.346.218,01

Makassar, 30 Desember 2022

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. A. Darmawati Bintang, MDevPlg

196704271993031015



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NERACA SALDO
PER 31 Desember 2022

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	0,00	58.697.626.099,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	6.987.675,00	0,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	2.230.000,00	0,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	534.597.040,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.719.748.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	591.780.200,00	0,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.600.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	29.970.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	33.472.530,00	0,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.250.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	546.813.200,00	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	706.289.486,00	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.460.710.369,00	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	4.500.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	778.821.300,00	0,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	4.900.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.009.838.555,00	0,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	5.900.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	309.908.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	27.250.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	221.951.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.950.000,00	0,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	73.712.460,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	635.229.140,00	0,00
1.3.02.06.01.0003	Peralatan Studio Gambar	49.590.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	57.124.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	10.400.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	99.780.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	345.836.610,00	0,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	40.903.775,00	0,00
1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	420.000,00	0,00
1.3.02.08.07.0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	35.249.715,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	5.259.052.526,00	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	726.130.344,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	253.075.610,00	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	129.828.100,00	0,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	783.000,00	0,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	21.240.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	6.480.816.100,00	0,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	249.665.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	665.945.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	102.060.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	947.763.400,00	0,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	850.861.838,40	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	199.200.000,00	0,00
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	29.600.000,00	0,00

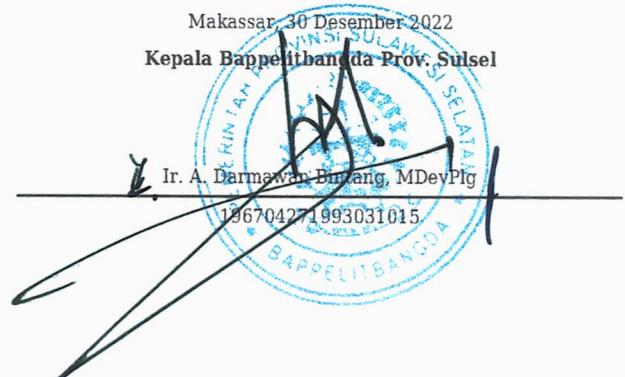
KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
1.3.04.03.01.0001	Instalasi Air Permukaan	15.000.000,00	0,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	95.769.700,00	0,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	378.483.000,00	0,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	41.107.000,00	0,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	383.900.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	1.278.977.850,00	0,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	37.000.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	13.000.000,00	0,00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan	89.299.500,00	0,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	3.817.782.294,45
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	29.970.000,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	5.637.262.640,19
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	677.252.626,85
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	378.976.508,45
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	5.043.878.774,23
1.3.07.01.18.0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	13.098.000,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	0,00	966.708.233,36
1.3.07.02.04.0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	28.234.810,40
1.3.07.03.02.0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	0,00	2.800.545,60
1.3.07.03.03.0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	79.847.752,05
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	0,00	386.499.081,66
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	420.000,00
1.5.02.01.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan	525.800.000,00	0,00
1.5.03.01.01.0005	Software	1.378.272.000,00	0,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	248.050.000,00	0,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	58.244.500,00	0,00
1.5.05.01.01.0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise	0,00	1.263.302.329,89
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	0,00	405.407.320,79
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	1.295.021.122,00
2.1.06.02.02.0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	197.700,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	5.931.000,00
2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	593.100,00
2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	494.250,00
2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	691.950,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	676.308,00
2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	31.631.520,00
2.1.06.02.02.0079	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	1.080.000,00
2.1.06.02.02.0080	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	1.434.000,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	20.384.416.033,37	0,00
3.1.01.01.01.0006	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	0,00	146.429.908,29
3.1.01.01.01.0017	Rekening Konsolidasi(RK)	0,00	37.136.560.799,38
3.1.01.01.01.0018	Koreksi Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,01
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	57.772.250.256,62
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	26.360.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	10.070.224.554,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	877.903.688,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	281.299.950,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	895.979.860,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	271.085.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	520.265.280,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.816.592,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	134.774,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	423.529.574,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.557.747,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	61.673.555,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.172.820.206,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.114.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	437.405.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.170.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	120.369.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	567.333.452,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	883.850.671,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.592.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	35.232.463,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	142.334.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.010.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.489.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.865.024.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	352.285.821,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	146.445.741,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	818.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	45.402.300,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	75.981.024,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.335.669.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	125.406.900,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	113.505.750,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.975.561.634,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	189.952.560,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	113.971.536,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	198.112.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	198.450.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.600.523,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	148.238.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.204.955,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	302.610.004,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.631.520,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.544.330,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.430.415,00	0,00
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	59.940.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	134.800.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	437.725.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.793.084.900,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	11.911.628,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	521.797.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	317.673.539,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.230.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	61.925.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	57.295.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	44.830.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	353.123.500,00	0,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	75.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	90.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	59.990.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.010.590.453,00	0,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	185.307.389,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	178.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	27.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	37.485.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	14.599.830,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	249.696.831,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	137.662.200,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	5.994.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	71.706.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	230.596.950,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	108.263.850,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	54.312.300,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	113.974.800,00	0,00
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	26.360.000,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	10.070.224.554,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	877.903.688,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	281.299.950,00	0,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	895.979.860,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	271.085.000,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	520.265.280,00	0,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.816.592,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	134.774,00	0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	423.529.574,00	0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.557.747,00	0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	61.673.555,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.314.791.846,00	0,00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.114.750,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	437.405.300,00	0,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.170.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	120.369.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	661.363.019,73	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	883.850.671,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	20.592.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	35.232.463,00	0,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	143.390.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.010.000,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.489.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.865.024.100,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	350.055.821,00	0,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	146.445.741,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	818.250.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	45.600.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	75.981.024,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.341.600.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	126.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	114.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.976.253.584,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	189.952.560,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	113.971.536,00	0,00
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	198.112.500,00	0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	198.450.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	9.124.861,00	0,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	148.238.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.204.955,00	0,00
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	302.610.004,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	63.263.040,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.624.330,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.864.415,00	0,00
8.1.02.02.04.0120	Beban Sewa Alat Pembersih	59.940.000,00	0,00
8.1.02.02.05.0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	134.800.000,00	0,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	100.000.000,00	0,00
8.1.02.02.07.0013	Beban Sewa Audio Visual	437.725.000,00	0,00
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.793.084.900,00	0,00
8.1.02.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis	11.911.628,00	0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	521.797.400,00	0,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	317.673.539,00	0,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.230.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	61.925.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	57.295.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	44.830.000,00	0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	353.123.500,00	0,00
8.1.02.03.04.0083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	75.000.000,00	0,00
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	90.000.000,00	0,00
8.1.02.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	59.990.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.010.590.453,00	0,00
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	185.307.389,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	178.000.000,00	0,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	27.000.000,00	0,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	37.485.000,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	272.775.486,08	0,00
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Mesin Ketik	538.913.020,02	0,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	72.934.028,65	0,00
8.1.08.01.08.0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	12.290.082,58	0,00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	477.472.330,50	0,00
8.1.08.01.18.0001	Beban Penyusutan Rambu Bersuar	4.248.000,00	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	196.862.657,86	0,00
8.1.08.02.02.0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	3.991.405,20	0,00
8.1.08.03.02.0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi	957.123,36	0,00
8.1.08.03.03.0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku - Instalasi Air Permukaan	12.819.616,44	0,00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	1.030.000,04	0,00
8.1.08.06.01.0001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.339.861.120,99	0,00
JUMLAH TOTAL		173.874.778.931,22	173.874.778.931,22

Makassar, 30 Desember 2022
Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel

 Ir. A. Darmawan Bimang, MDevPlg
 196704271993031015



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021	Peningkatan / (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	26.360.000,00	27.160.000,00	(800.000,00)	(2.95)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.360.000,00	27.160.000,00	(800.000,00)	(2.95)
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	26.360.000,00	27.160.000,00	(800.000,00)	(2.95)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	26.360.000,00	27.160.000,00	(800.000,00)	(2.95)
8					
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0.00
10	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0.00
11	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0.00
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0.00
13	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0.00
14	JUMLAH PENDAPATAN	26.360.000,00	27.160.000,00	(800.000,00)	(2.95)
15					
16	BEBAN	60.947.739.275,45	57.108.251.198,85	3.839.488.076,60	6.72
17	BEBAN OPERASI	58.013.584.403,73	55.239.779.074,27	2.773.805.329,46	5.02
18	Beban Pegawai	28.818.262.420,00	29.053.814.757,00	(235.552.337,00)	(0.81)
19	Beban Barang dan Jasa	29.195.321.983,73	26.185.964.317,27	3.009.357.666,46	11.49

NO	URAIAN	2022	2021	Peningkatan / (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5	6
20	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Beban Operasi	58.013.584.403,73	55.239.779.074,27	2.773.805.329,46	5.02
27					
28	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
31					
32	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.934.154.871,72	1.868.472.124,58	1.065.682.747,14	57.03
33	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.378.632.947,83	1.611.024.543,93	(232.391.596,10)	(14.43)
34	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	200.854.063,06	226.682.383,91	(25.828.320,85)	(11.39)
35	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.806.739,84	30.765.196,74	(15.958.456,90)	(51.87)
36	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.339.861.120,99	0,00	1.339.861.120,99	0,00
39	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.934.154.871,72	1.868.472.124,58	1.065.682.747,14	57.03
40					
41	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN 2	2022 3	2021 4	Peningkatan / (Penurunan) 5	(%) 6
1					
43	JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
44	JUMLAH BEBAN	60.947.739.275,45	57.108.251.198,85	3.839.488.076,60	6.72
45					
46	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(60.921.379.275,45)	(57.081.091.198,85)	(3.840.288.076,60)	6.73
47					
48	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
53					
54	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Defisit Penghapusan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
60	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
61					
62	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(60.921.379.275,45)	(57.081.091.198,85)	(3.840.288.076,60)	6.73
63	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	2022	2021	Penaikan / (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5	6
66	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
69	JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(60.921.379.275,45)	(57.081.091.198,85)	(3.840.288.076,60)	6.73

Makassar, 30 Desember 2022

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan



Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg
196704271993031015



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	(20.384.416.033,37)	(26.360.742.948,35)
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(60.921.379.275,45)	(57.081.091.198,85)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	37.282.990.707,68	63.057.418.113,83
4	- Rekening Konsolidasi (RK)	37.136.560.799,38	62.292.765.422,00
5	- Koreksi Aset Lancar	0,00	0,00
6	- Koreksi Investasi	0,00	0,00
7	- Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
8	- Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
9	- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	146.429.908,29	764.476.764,83
10	- Koreksi Penyusutan aset Lainnya	0,01	0,00
11	- Koreksi Hutang	0,00	175.927,00
12	EKUITAS AKHIR	(44.022.804.601,14)	(20.384.416.033,37)

Makassar, 30 Desember 2022

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg

186704271993031015

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai entitas pelaporan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode APBD Tahun 2022 untuk kepentingan Akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan menyajikan Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022), yang akhirnya dapat digunakan untuk perencanaan penyusunan APBD dan perencanaan pembangunan secara komprehensif. Untuk tujuan tersebut laporan keuangan selaku entitas pelaporan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 31 Desember 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 31 Desember 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 53);
23. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 46/I/Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan, Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

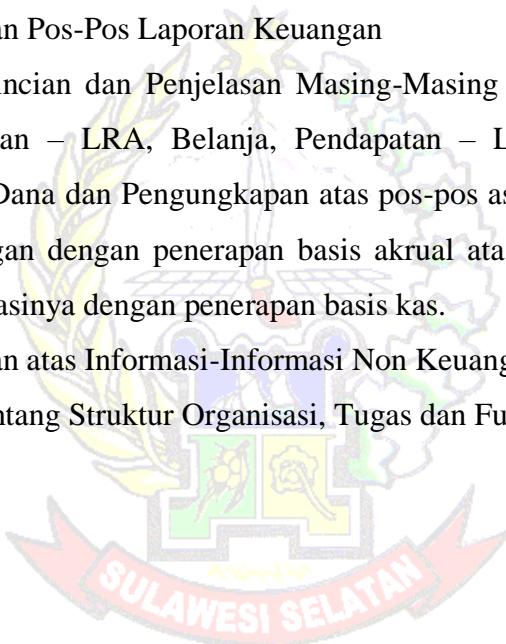
Bab III : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pendapatan – LRA, Belanja, Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB IV : Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Berisi tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Sumberdaya OPD.

BAB V : Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan dan fisik Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam Tahun Anggaran 2022 dibandingkan antara anggaran dengan realisasi yaitu:

I. Pendapatan

Pendapatan yang direncanakan padat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.26.960.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp.26.360.000,00 atau 97,77%

II. Belanja

Belanja yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.62.878.889.896,00 terealisasi sebesar Rp.58.723.986.099 atau 93,39%

Secara keseluruhan Capaian Kinerja keuangan dan fisik Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENELITIAN
BULAN DESEMBER 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI	
					KEU	FISIK
1	2	3	4	(4-3)=5	6	7
A.	PENDAPATAN	26.960.000,00	26.360.000,00	(600.000,00)	97,77	
1.	Pendapatan Asli Daerah	26.960.000,00	26.360.000,00	(600.000,00)	97,77	
1.1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	26.960.000,00	26.360.000,00	(600.000,00)	97,77	
Keterangan: penurunan jumlah penyewa mess dari jumlah yang dianggarkan						
B.	BELANJA DAERAH	62.878.889.896,00	58.723.986.099,00	(4.154.903.797,00)	93,39	100,00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.426.539.754,00	36.861.213.057,00	(565.326.697,00)	98,49	98,96
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	693.963.900,00	637.201.006,00	(56.762.894,00)	91,82	91,61
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 637.201.006				
Keluaran		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu sebanyak 100%				
Hasil		Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun 100 %				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.701.000,00	58.884.844,00	(1.816.156,00)	97,01	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	111.260.300,00	108.351.174,00	(2.909.126,00)	97,39	100,00
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	522.002.600,00	469.964.988,00	(52.037.612,00)	90,03	100,00

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.364.475.106,00	29.064.428.904,00	(300.046.202,00)	98,98	100	
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 29.064.428.904					
Keluaran		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu sebanyak 100%					
Hasil		Tersusunnya dokumen laporan keuangan dengan tepat waktu 100 %					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.954.033.106,00	28.676.290.780,00	(277.742.326,00)	99,04	100	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	307.314.000,00	290.428.500,00	(16.885.500,00)	94,51	100	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	103.128.000,00	97.709.624,00	(5.418.376,00)	94,75	100,00	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.837.500,00	73.395.849,00	(441.651,00)	99,40	100	
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 73.395.849					
Keluaran		Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan sebanyak 100%					
Hasil		Ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 100 %					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.775.500,00	15.638.300,00	(137.200,00)	99,13	100	
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.062.000,00	57.757.549,00	(304.451,00)	99,48	100	
1.4	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	403.733.100,00	400.953.334,00	(2.779.766,00)	99,31	100	
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 400.953.334					
Keluaran		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN sebanyak 100 rata-rata					
Hasil		Ketersediaan Administrasi Aparat Perangkat Daerah 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.067.500,00	149.850.555,00	(216.945,00)	99,86	100	
1.4.2	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	78.497.500,00	78.421.380,00	(76.120,00)	99,90	100	
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.617.300,00	19.190.688,00	(426.612,00)	97,83	100	
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155.550.800,00	153.490.711,00	(2.060.089,00)	98,68	100	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.164.298.900,00	2.157.754.467,00	(6.544.433,00)	99,70	100	
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 2.157.754.467					
Keluaran		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor sebanyak 100%					
Hasil		Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah 100 %					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	148.332.500,00	148.080.660,00	(251.840,00)	99,83	100	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.881.000,00	216.563.520,00	(317.480,00)	99,85	100	
1.5.3	Penyediaan Bahan/Material	39.255.500,00	39.094.000,00	(161.500,00)	99,59	100	
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.703.800,00	200.121.031,00	(582.769,00)	99,71	100	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.559.126.100,00	1.553.895.256,00	(5.230.844,00)	99,66	100	

1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.085.227.000,00	973.476.046,00	(111.750.954,00)	89,70	100	
	Masukan	Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 973.476.046					
	Keluaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 100%					
	Hasil	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.6.1	Pengadaan Aset Tak Berwujud	54.040.000,00	3.878.025,00	(50.161.975,00)	7,18	100	
	Adanya aturan tentang pengadaan aplikasi satu pintu yang hanya boleh diadakan di dinas kominfo						
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.031.187.000,00	969.598.021,00	(61.588.979,00)	94,03	100	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.168.128,00	918.536.792,00	(46.631.336,00)	95,17	100	
	Masukan	Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 918.536.792					
	Keluaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 100%					
	Hasil	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.936.500,00	157.838.523,00	(6.097.977,00)	96,28	100	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801.231.628,00	760.698.269,00	(40.533.359,00)	94,94	100	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.675.836.120,00	2.635.466.659,00	(40.369.461,00)	98,49	100	
	Masukan	Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 2.635.466.659					
	Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik sebanyak 100% Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik sebanyak 100%					
	Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik sebanyak 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	644.590.000,00	619.684.285,00	(24.905.715,00)	96,14	100	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	574.858.560,00	563.141.195,00	(11.717.365,00)	97,96	100	
1.8.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	103.964.500,00	102.449.000,00	(1.515.500,00)	98,54	100	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	549.836.560,00	548.952.940,00	(883.620,00)	99,84	100	
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	802.586.500,00	801.239.239,00	(1.347.261,00)	99,83	100	
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11.261.969.814,00	9.988.156.771,00	(1.273.813.043,00)	88,69	100	
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.451.093.500,00	3.170.553.584,00	(280.539.916,00)	91,87	100	
	Masukan	Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 3.170.553.584					
	Keluaran	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan sebanyak 100%					

Hasil		Percentase Dokumen / Usulan, Perencanaan & Pendanaan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku sebanyak 100%				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
2.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	393.251.200,00	337.448.135,00	(55.803.065,00)	85,81	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
2.1.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3.057.842.300,00	2.833.105.449,00	(224.736.851,00)	92,65	100
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	267.362.800,00	196.528.679,00	(70.834.121,00)	73,51	100
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 196.528.679				
Keluaran		Percentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan sebanyak 100%				
Hasil		Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
2.2.1	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	267.362.800,00	196.528.679,00	(70.834.121,00)	73,51	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
2.3	Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.543.513.514,00	6.621.074.508,00	(922.439.006,00)	87,77	100
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 6.621.074.508				
Keluaran		Percentase Kesesuaian Hasil Evaluasi Pembangunan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 100%				
Hasil		Percentase Rekomendasi hasil evaluasi Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	6.394.888.114,00	5.652.442.788,00	(742.445.326,00)	88,39	100
Adanya efisiensi belanja makan minum rapat & belanja perjalanan dinas						
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	832.800.600,00	760.455.299,00	(72.345.301,00)	91,31	100
2.3.3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	315.824.800,00	208.176.421,00	(107.648.379,00)	65,92	100
Adanya efisiensi belanja honorarium narasumber						
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.587.721.788,00	4.733.429.019,00	(854.292.769,00)	84,71	100
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.242.904.638,00	989.524.155,00	(253.380.483,00)	79,61	100
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 989.524.155				
Keluaran		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan Koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 12 Rekomendasi				
Hasil		Termanfaatkannya Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 100 %				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				

3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128.052.800,00	98.556.630,00	(29.496.170,00)	76,97	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	177.720.100,00	131.369.388,00	(46.350.712,00)	73,92	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	257.495.568,00	212.345.913,00	(45.149.655,00)	82,47	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	282.445.000,00	235.054.992,00	(47.390.008,00)	83,22	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.1.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	224.351.170,00	176.033.968,00	(48.317.202,00)	78,46	100
3.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	172.840.000,00	136.163.264,00	(36.676.736,00)	78,78	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.207.388.500,00	1.010.059.777,00	(197.328.723,00)	83,66	100,00
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 1.010.059.777				
Keluaran		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA sebanyak 7 Rekomendasi				
Hasil		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA sebanyak 100%				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156.156.900,00	129.446.081,00	(26.710.819,00)	82,89	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	183.922.900,00	152.653.958,00	(31.268.942,00)	83,00	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.2.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	265.222.400,00	234.627.820,00	(30.594.580,00)	88,46	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.2.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	151.785.100,00	123.451.448,00	(28.333.652,00)	81,33	100
Adanya efisiensi belanja makan minum rapat & belanja perjalanan dinas						
3.2.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	171.943.300,00	147.053.437,00	(24.889.863,00)	85,52	100

Adanya efisiensi belanja makan minum rapat & belanja perjalanan dinas						
3.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	278.357.900,00	222.827.033,00	(55.530.867,00)	80,05	100
Adanya efisiensi belanja makan minum rapat & belanja perjalanan dinas						
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	3.137.428.650,00	2.733.845.087,00	(403.583.563,00)	87,14	100,00
Masukan						
Keluaran		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 2.733.845.087				
Hasil		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya sebanyak 6 rekomendasi				
Sumber Pendanaan		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya				
Lokasi		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202.040.800,00	146.025.555,00	(56.015.245,00)	72,28	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	155.620.900,00	134.620.796,00	(21.000.104,00)	86,51	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.3.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2.174.150.250,00	1.948.870.236,00	(225.280.014,00)	89,64	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
3.3.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.202.800,00	174.385.600,00	(21.817.200,00)	88,88	100
Adanya efisiensi belanja makan minum rapat & belanja perjalanan dinas						
3.3.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	129.711.500,00	109.541.143,00	(20.170.357,00)	84,45	100
Adanya efisiensi belanja makan minum rapat & belanja perjalanan dinas						
3.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	279.702.400,00	220.401.757,00	(59.300.643,00)	78,80	100
Adanya efisiensi belanja makan minum rapat & belanja perjalanan dinas						
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.602.658.540,00	7.141.187.252,00	(1.461.471.288,00)	83,01	100
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.094.736.500,00	762.989.738,00	(331.746.762,00)	69,70	100
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 762.989.738				
Keluaran		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebanyak 2 Rekomendasi				
Hasil		Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebanyak 2 rekomendasi				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				

4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	833.107.200,00	517.086.486,00	(316.020.714,00)	62,07	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.1.2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	261.629.300,00	245.903.252,00	(15.726.048,00)	93,99	100
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2.437.626.800,00	2.015.268.015,00	(422.358.785,00)	82,67	100
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 2.015.268.015				
Keluaran		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sebanyak 7 Rekomendasi				
Hasil		Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sebanyak 7 rekomendasi				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	254.146.300,00	218.217.800,00	(35.928.500,00)	85,86	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.2.2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1.937.183.200,00	1.583.899.659,00	(353.283.541,00)	81,76	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.2.3	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	246.297.300,00	213.150.556,00	(33.146.744,00)	86,54	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.714.460.940,00	3.156.429.553,00	(558.031.387,00)	84,98	100,00
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 3.156.429.553				
Keluaran		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebanyak 8 Rekomendasi				
Hasil		Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
4.3.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	494.434.500,00	442.447.132,00	(51.987.368,00)	89,49	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.3.2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1.076.851.400,00	955.782.836,00	(121.068.564,00)	88,76	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.3.3	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	207.465.040,00	184.156.488,00	(23.308.552,00)	88,77	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.3.4	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1.935.710.000,00	1.574.043.097,00	(361.666.903,00)	81,32	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.355.834.300,00	1.206.499.946,00	(149.334.354,00)	88,99	100,00
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 1.206.499.946				
Keluaran		Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi sebanyak 11 OPD				
Hasil		Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dikembangkan dan diterapkan Perangkat Daerah sebanyak 11 Inovasi				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kota Makassar				
4.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	203.221.600,00	185.587.538,00	(17.634.062,00)	91,32	100

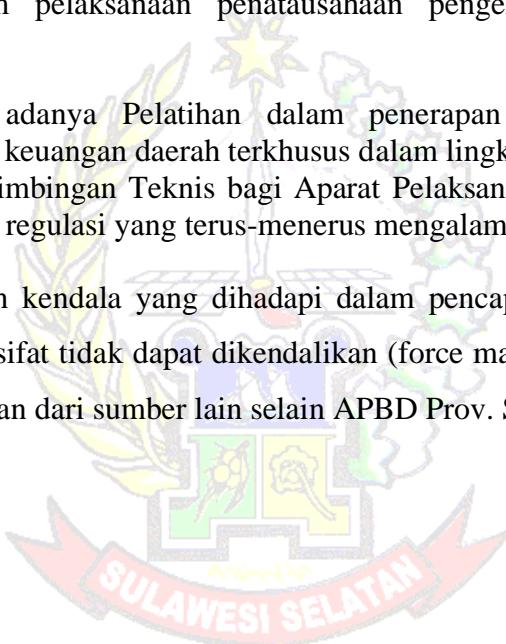
4.4.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangunan/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	32.580.000,00	30.450.900,00	(2.129.100,00)	93,47	100
4.4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	688.128.200,00	601.859.770,00	(86.268.430,00)	87,46	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.4.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	118.160.500,00	88.110.350,00	(30.050.150,00)	74,57	100
Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas						
4.4.4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	313.744.000,00	300.491.388,00	(13.252.612,00)	95,78	100

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan mengalami kendala antara lain:

1. Masih perlu adanya Pelatihan dalam penerapan sistem aplikasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah terkhusus dalam lingkup OPD;
2. Pelaksanaan bimbingan Teknis bagi Aparat Pelaksana Administrasi Keuangan tidak seiring dengan regulasi yang terus-menerus mengalami perubahan;

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yang bersifat tidak dapat dikendalikan (force major) dikarenakan belum adanya dukungan pembiayaan dari sumber lain selain APBD Prov. Sulsel.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan Penjelasan dari Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

3.1.1 PENDAPATAN - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki target Pendapatan sebesar Rp. 26.960.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 26.360.000,00 atau 97,77% untuk Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021, memperoleh Pendapatan sebesar Rp.27.160.000,00.

3.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2022		2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
62.878.889.896,00	58.723.986.099,00	59.835.877.467,00

Untuk belanja daerah dialokasikan pada Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp. 62.878.889.896,00 sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp.58.723.986.099,00 atau 93,39%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.154.903.797,00 atau 6,61%. Realisasi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan belanja mengalami Penurunan dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 59.835.877.467,00

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi

2022		2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
61.769.832.896,00	57.737.179.338,00	57.984.652.267,00

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 61.769.832.896 dapat direalisasikan sebesar Rp. 57.737.179.338,00 atau 93,47% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.032.653.558,00 atau 6,53%. Berdasarkan realisasi anggaran jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 57.984.652.267,00 mengalami penurunan realisasi. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

Belanja Operasi terdiri dari:

No.	Jenis Belanja Operasi	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	28.954.033.106,00	28.676.290.780,00	99,04	29.377.678.615,00
2	Belanja Barang dan Jasa	32.815.799.790,00	29.060.888.558,00	88,56	28.606.973.652,00
Jumlah		61.769.832.896,00	57.737.179.338,00	93,47	57.984.652.267,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 28.954.033.106,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.676.290.780,00 atau 99,04%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 277.742.326,00. Tidak terserapnya Belanja Pegawai sebesar 0,96% tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai di lingkup Bappelitbangda dengan rincian pensiun 6 orang, meninggal 2 orang, dan pindah karna promosi jabatan sebanyak 10 orang . Realisasi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan belanja mengalami penurunan dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.29.377.678.615,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Pegawai	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan	13.541.346.012,00	13.503.470.574,00	99,72	13.084.572.321,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	15.412.687.094,00	15.172.820.206,00	98,44	16.293.106.294,00
Jumlah		28.954.033.106,00	28.676.290.780,00	99,04	29.377.678.615,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 32.815.799.790,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.060.888.558,00 atau 88,56% terdapat sisa anggaran

sebesar Rp.3.754.911.232,00 atau 11,44%. Sisa Anggaran tersebut merupakan penghematan Belanja Barang dan Jasa. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp.28.606.973.652,00, realisasi ditahun 2022 mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5.846.110.850,00	5.668.176.798,00	96,96	4.291.354.675,00
2	Belanja Jasa Kantor	10.708.874.832,00	9.708.916.686,00	90,66	13.852.492.119
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	235.000.000,00	234.800.000,00	99,91	6.000.000,00
4	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	438.475.000,00	437.725.000,00	99,83	296.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.960.000.000,00	4.793.084.900,00	80,42	4.152.092.000,00
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00	11.911.628,00	99,26	15.790.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.092.541.000,00	1.090.750.939,00	99,84	930.586.509,00
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	354.000.000,00	353.123.500,00	99,75	771.498.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.000.000,00	224.990.000,00	100,00	39.880.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.694.704.600,00	6.373.377.842,00	82,83	4.228.780.349,00
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.500.000,00	64.485.000,00	95,53	22.500.000,00
12	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.940.000,00	99,90	0,00
13	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	121.593.508,00	39.606.265,00	32,57	0,00
Jumlah		32.815.799.790,00	29.060.888.558,00	88,56	28.606.973.652,00

b. Belanja Modal

2022		2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
1.109.057.000,00	986.806.761,00	1.851.225.200,00

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 1.109.057.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 986.806.761,00 atau 88,98% . Dengan demikian terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 122.250.239,00 atau 11,02%, realisasi tersebut menurun dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.851.225.200,00

Belanja Modal terdiri dari:

No.	Jenis Belanja Modal	2022		2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	944.057.000,00	872.831.961,00	1.299.241.200,00
3	Gedung dan Bangunan	115.000.000,00	113.974.800,00	303.934.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	0,00	0,00	248.050.000,00
Jumlah		1.109.057.000,00	986.806.761,00	1.851.225.20,00

1) Belanja Tanah

Tidak ada pengadaan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 944.057.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 872.831.961,00 atau 92,46%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 71.225.039,00 atau 7,54%. Tidak terserapnya anggaran merupakan efisiensi atas belanja modal. Realisasi tersebut menurun dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.299.241.200,00.

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

No.	Belanja Modal Pengadaan	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Kantor	294.071.000,00	264.296.661,00	89,88	682.523.100,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	138.240.000,00	137.662.200,00	99,58	51.688.500,00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	78.500.000,00	77.700.000,00	98,98	89.750.000,00
4	Belanja Modal Komputer Unit	246.096.000,00	230.596.950,00	93,70	439.773.100,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	4.094.500,00
6	Belanja Modal alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
7	Belanja Modal Peralatan Komputer	187.150.000,00	162.576.150,00	86,87	18.912.000,00
Jumlah		944.057.000,00	872.831.961,00	92,46	1.229.241.200,00

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja pengadaan konstruksi/pembelian bangunan direncanakan sebesar Rp. 115.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 113.974.800,00 atau 99,11% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.025.200,00.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak ada pengadaan.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 Tidak direalisasikan karena adanya aturan Diskominfo untuk satu hosting dalam pengelolaan informasi setiap OPD yaitu pada Website PPID Bappelitbangda

6). Belanja Aset Lainnya

Tidak ada pengadaan

3.1.3 PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki target Pendapatan sebesar Rp. 26.960.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 26.360.000,00 atau 97,77% untuk Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021, memperoleh Pendapatan sebesar Rp.27.160.000,-.

2022	2021
26.360.000,00	27.160.000,00

3.1.4 BEBAN

2022	2021
60.947.739.275,45	57.108.251.198,85

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: (a) timbulnya kewajiban; (b) terjadinya konsumsi aset; (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pada Tahun Anggaran 2022 saldo Beban sebesar Rp. 60.947.739.275,45 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 57.108.251.198,85, mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.839.488.076,60 atau sebesar 6,72%

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Beban yang terdiri dari:

1. Beban Operasi

Saldo beban operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 58.0113.584.403,73 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.773.805.329,46 atau sebesar 5,02% dibandingkan dengan saldo beban operasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.55.239.779.074,27

Beban Operasi terdiri dari

No.	Jenis Beban Operasi	2022	2021
1	Beban Pegawai	28.818.262.420,00	29.053.814.757,00
2	Beban Barang dan Jasa	29.195.321.983,73	26.185.964.317,27
Jumlah		58.013.584.403,73	55.239.779.074,27

1) Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 28.818.262.420,00.

Saldo tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saldo beban di Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 29.053.814.757,00 atau sekitar 0,81%

Beban Pegawai terdiri dari:

No.	Jenis Beban Pegawai	2022	2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan	13.503.470.574,00	13.084.572.321,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.314.791.846,00	15.969.242.436,00
Jumlah		28.818.262.420,00	29.053.814.757,00

2) Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.29.195.321.983,73. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.26.185.964.317,27, beban barang dan jasa Tahun Aggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.009.357.666,46 atau sebesar 11,49%

Beban Barang dan Jasa terdiri dari:

a) Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.760.512.365,73

No.	Jenis Beban Persediaan	2022	2021
1	Beban Bahan	586.059.550,00	407.485.700,00
2	Beban Persediaan Bahan / Material	1.812.927.153,73	1.477.635.332,27
3	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	437.405.300,00	379.917.700,00
4	Beban Makanan dan Minuman	3.215.079.921,00	2.022.136.800,00

No.	Jenis Beban Persediaan	2022	2021
5	Beban Pakaian KORPRI	146.445.741,00	0,00
	Jumlah	5.760.512.365,73	3.907.257.832,27

b) Beban Jasa

Saldo Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.327.562.337,00 Beban Jasa terdiri dari:

No.	Jenis Beban Jasa	2022	2021
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	818.250.000,00	493.400.000,00
2	Beban Jasa Kantor	8.413.921.204,00	13.112.692.288,00
3	Beban Tagihan Listrik	9.124.861,00	13.991.429,00
4	Beban Kawat/Faksimili/internet/ TV Berlangganan	148.238.000,00	0,00
5	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.204.955,00	34.396.694,00
6	Beban Lembur	302.610.004,00	132.056.016,00
7	Beban Iuran Non ASN	73.751.785,00	0,00
8	Beban Sewa	732.465.000,00	302.000.000,00
8	Beban Jasa Konsultasi	4.793.084.900,00	2.332.900.000,00
9	Beban Bimbingan Teknis	11.911.628,00	15.790.000,00
	Jumlah	15.327.562.337,00	16.437.226.427,00

c) Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.668.864.439,00.

Beban Pemeliharaan terdiri dari:

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	2022	2021
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.090.750.939,00	930.586.509,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	353.123.500,00	619.733.200,00
3	Beban Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	224.990.000,00	39.880.000,00
	Jumlah	1.668.864.439,00	1.590.199.709,00

d) Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.6.373.897.842,00

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari:

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	2022	2021
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.010.590.453,00	3.922.226.545,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	185.307.389,00	270.493.804,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	178.000.000,00	36.060.000,00
Jumlah		6.373.897.842,00	4.228.780.349,00

e) Beban Hadiah

Saldo Beban Hadiah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 64.485.000,00.

Beban Hadiah terdiri dari:

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	2022	2021
1	Beban Hadiah yang bersifat perlombaan	27.000.000,00	22.500.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	37.485.000,00	0,00
Jumlah		64.485.000,00	22.500.000,00

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.934.154.871,72. Saldo tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.1.065.682.747,14 atau sebesar 57,03% dibandingkan dengan saldo Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 1.868.472.124,58. hal ini sebabkan adanya mutasi dan penghapusan aset yang ikut mempengaruhi beban penyusutannya.

Beban Penyusutan terdiri dari :

No.	Jenis Beban Penyusutan	2022	2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.381.692.286,09	1.611.024.543,93
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.694.936,74	226.682.383,91
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.236.482,30	30.765.196,74
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	100.614.375,00	0,00
Jumlah		1.670.238.080,13	1.868.472.124,58

3.1.5 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

1) Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, piutang lainnya, dan persediaan.

KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Bendahara Pengeluaran :

Saldo Kas/ Setara Kas per 31 Desember 2022 sejumlah	Rp. 0,00
Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2022	Rp. 0,00
Jumlah Rp.	0,00

Persediaan

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis / material terdiri atas Obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak, Alat Listrik, Alat Kebersihan, Barang Modal dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai sebesar Rp. 9.217.675 dengan rincian sebagai berikut :

• Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 6.987.675,00
• Makanan dan Minuman	<u>Rp. 2.230.000,00</u>
Jumlah	Rp. 9.217.675,00

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Penggerjaan

a) Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 534.597.040,00 merupakan Aset tanah yang dapat dirinci sebagai berikut :

N0	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	534.597.040,00	-	-	534.597.040,00
Jumlah		534.597.040,00	-		534.597.040,00

b) Peralatan dan Mesin*Alat Angkutan*

Alat Angkutan Merupakan nilai Alat Angkutan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

N0	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.059.748.000,00	-	340.000.000,00	3.719.748.000,00
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	611.280.200,00	-	19.500.000,00	591.780.200,00
3	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
Jumlah		4.673.628.200,00	-	359.500.000,00	4.314.128.200,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel dan Alat Ukur Merupakan nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

N0	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Perkakas Bengkel Kayu	29.970.000	-	-	29.970.000
Jumlah		29.970.000	-		29.970.000

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga Merupakan nilai alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

N0	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Mesin Ketik	18.872.700,00	14.599.830,00	-	33.472.530,00
2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.250.000,00	-	-	7.250.000,00
3	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	546.813.200,00	-	-	546.813.200,00
4	Alat Kantor Lainnya	639.117.170,00	249.696.831,00	182.524.515,00	706.289.486,00

5	Meubelair	1.460.710.369,00	-	-	1.460.710.369,00
6	Alat Pembersih	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
7	Alat Pendingin	641.159.100,00	137.662.200,00	-	778.821.300,00
8	Alat Dapur	4.900.000,00	-	-	4.900.000,00
9	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.898.172.555,00	111.666.000,00	-	3.009.838.555,00
10	Alat Pemadam Kebakaran	5.900.000,00	-	-	5.900.000,00
11	Meja Kerja Pejabat	309.908.000,00	-	-	309.908.000,00
12	Meja Rapat Pejabat	27.250.000,00	-	-	27.250.000,00
13	Kursi Kerja Pejabat	221.951.000,00	-	-	221.951.000,00
14	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5.950.000,00	-	-	5.950.000,00
Jumlah		6.792.454.094,00	513.624.861,00	182.524.515	7.123.554.440,00

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Merupakan nilai Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Peralatan Studio Audio	73.712.460,00	-	-	73.712.460,00
2	Peralatan Studio Video Dan Film	563.523.140,00	71.706.000,00	-	635.229.140,00
3	Peralatan Studio Gambar	49.590.000,00	-	-	49.590.000,00
4	Peralatan Cetak	-	5.994.000,00	5.994.000,00	-
5	Alat Studio Lainnya	-	71.706.000,00	71.706.000,00	-
6	Alat Komunikasi Telephone	57.124.000,00	-	-	57.124.000,00
7	Alat Komunikasi Sosial	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00
8	Alat Komunikasi Khusus	99.780.000,00	-	-	99.780.000,00
Jumlah		854.129.600,00	149.406.000,00	77.700.000,00	925.835.600,00

Alat Laboratorium

Alat laboratorium merupakan nilai alat laboratorium per 31 Desember 20212 yang terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Alat Laboratorium Umum	345.836.610,00	-	-	345.836.610,00
2	Alat Laboratorium Pertanian	40.903.775,00	-	-	40.903.775,00
3	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	420.000,00	-	-	420.000,00
4	Alat Laboratorium Kwalitas Udara		35.249.715,00		35.249.715,00
Jumlah		387.160.385,00	35.249.715,00	-	422.410.100,00

Komputer

Komputer merupakan nilai alat keamanan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Personal Komputer	4.943.540.576,00	315.511.950,00	-	5.259.052.526,00
2	Peralatan Mainframe	726.130.344,00	-	-	726.130.344,00
3	Peralatan Personal Komputer	133.811.660,00	174.930.450,00	55.666.500,00	253.075.610,00
4	Peralatan Jaringan	129.828.100,00	-	-	129.828.100,00
5	Peralatan Komputer Lainnya	783.000,00	54.312.300,00	54.312.300,00	783.000,00
Jumlah		5.934.093.680,00	544.754.700,00	109.978.800,00	6.368.869.580,00

Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan nilai rambu per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Rambu Tidak Bersuar	21.240.000,00	-	-	21.240.000,00
Jumlah		21.240.000,00			21.240.000,00

c) Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

Bangunan Gedung merupakan nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 sebesar terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan Gedung Kantor	6.314.221.550,00	951.817.800,00	785.223.250,00	6.480.816.100,00
2	Bangunan Gudang	344.195.000,00	-	94.530.000,00	249.665.000,00
3	Bangunan Gedung Laboratorium	665.945.000,00	-	-	665.945.000,00
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	597.039.000,00	-	494.979.000,00	102.060.000,00
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.337.762.060,00	407.447.000,00	797.445.660,00	947.763.400,00
6	Bangunan Fasilitas Umum	144.644.000,00	-	144.644.000,00	-
7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	850.861.838,40	-	-	850.861.838,40
Jumlah		10.254.668.448,40	1.359.264.800,00	2.316.821.910,00	9.297.111.338,40

Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu titik control/pasti merupakan nilai tugu per 31 Desember 2022 sebesar terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Pagar	199.200.000,00	-	-	382.346.500,00
Jumlah		199.200.000,00	-	-	382.346.500,00

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Bangunan Air Irigasi, Instalasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jembatan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Bangunan Air

Bangunan Air merupakan nilai tugu per 31 Desember 2022 sebesar terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	29.600.000,00	-	-	29.600.000,00
Jumlah		29.600.000,00	-	-	29.600.000,00

Instalasi

Instalasi merupakan nilai tugu per 31 Desember 2022 sebesar terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Instalasi Air Permukaan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
2	Instalasi Gardu Listrik Induk	95.769.700,00	-	-	95.769.700,00
3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	378.483.000,00	-	-	378.483.000,00
Jumlah		489.252.700,00	-	-	489.252.700,00

Jaringan

Jaringan merupakan nilai tugu per 31 Desember 2022 sebesar terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Jaringan Transmisi	41.107.000,00	-	-	41.107.000,00
2	Jaringan Telepon Diatas Tanah	383.900.000,00	-	-	383.900.000,00
Jumlah		425.007.000,00	-	-	425.007.000,00

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.328.977.850,00

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Buku Umum	1.278.977.850,00	-	-	1.278.977.850,00
2	Buku Ilmu Sosial	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00
3	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00
Jumlah		1.328.977.850,00	-	-	1.328.977.850,00

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 89.299.500,00

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2022	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022		SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	89.299.500,00	-	89.299.500,00
Jumlah		-	89.299.500,00	-	89.299.500,00

g) Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai Aset tetap sebagai dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset. Nilai akumulasi penyusutan Aset tetap Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.(17.656.791.666,65)** terdiri dari :

(1) Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 yaitu :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp	(14.579.087.897,13)
Beban Penyusutan T.A. 2022	Rp	(1.381.692.286,09)
Mutasi Tambah	Rp	(1.381.692.286,09)
Mutasi Kurang	Rp	(589.028.167,99)
Jumlah	Rp	(15.371.752.015,23)

(2) Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp	(997.375.455,82)
Beban Penyusutan T.A. 2022	Rp	(173.694.936,74)
Mutasi Tambah	Rp.	(1.012.391.565,67)
Mutasi Kurang	Rp	(203.625.880,36)
Jumlah	Rp .	(1.806.141.141,13)

(3) Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp	(454.340.639,47)
Beban Penyusutan T.A. 2022	Rp	(14.236.482,30)
Mutasi Tambah	Rp	(24.557.870,82)
Jumlah	Rp	(478.898.510,29)

(4) Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya merupakan nilai akumulasi penyusutan Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp	(420.000,00)
Beban Penyusutan T.A. 2022	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(420.000,00)

3) Aset Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
553.251.547,62	1.881.517.970,30

Aset Lainnya untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari

NO	NAMA/JENIS BARANG	SALDO AWAL	Mutasi 1 Jan s.d 31 Des 2022	SALDO AKHIR

		1 Januari 2022	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2022
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	525.800.000,00	-	-	525.800.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	1.626.322.000,00	-	-	1.626.322.000,00
3	Aset Lain-Lain	58.244.500,00	-	-	58.244.500,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(1.260.856.166,67)	-	(1.260.856.166,67)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(328.848.529,70)	(75.114.285,72)	(7.704.029,71)	(396.258.785,71)
Jumlah		1.881.517.970,30	(1.335.970.452,39)	(7.704.029,71)	553.251.547,62

3.1.6 KEWAJIBAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.337.750.950,00	1.154.201.452,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah yang terdiri dari :

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kewajiban Jangka Pendek	1.337.750.950,00	1.154.201.452,00
Jumlah		1.337.750.950,00	1.154.201.452,00

- 1) Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban

31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.337.750.950,00	1.154.201.452,00

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

Utang Belanja TPP ASN T.A. 2022	Rp 1.295.021.122,00
Utang Belanja Tagihan Listrik 2022	Rp 676.308,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Non ASN (BPJS 1%)	Rp 7.908.000,00
Utang Belanja Asuransi JamKes Non ASN	Rp 31.631.520,00
Utang Belanja Asuransi JKK Non ASN	Rp 1.080.000,00
Utang Belanja Asuransi JKM Non ASN	Rp 1.434.000,00
Jumlah	Rp 1.337.750.950,00

- 2) Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp 0,00
Utang Jangka Panjang T.A. 2022	Rp 0,00

Jumlah	Rp	0,00
--------	-----------	-------------

3.1.7 EKUITAS DANA

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp (44.347.009.516,53) dengan uraian sebagai berikut:

-Ekuitas Awal	Rp (20.384.416.033,37)
-Penyesuaian/Mutasi	
Penambahan	Rp (59.474.315.983,86)
Pengurangan	Rp <u>(35.511.722.500,70)</u>
	Rp <u>(23.962.593.483,16)</u>
-Ekuitas Akhir	Rp (44.347.009.516,53)

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

1. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi

Belanja TPP untuk bulan Desember telah diakui sebagai Beban Pegawai meskipun belum dibayarkan di bulan berjalan. Hal ini dikarenakan dalam basis akrual yang pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Begitu pula dengan Beban Barang dan Jasa dalam hal ini Beban listrik yang merupakan belanja listrik yang telah diakui sebagai beban ketika tagihan listrik sudah diterima meskipun belum dibayarkan.

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan (*Depreciation Expense*), merupakan beban yang timbul karena pemakaian aset berwujud.

2. Utang Belanja TPP dan Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja TPP terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, dalam hal ini pembayaran TPP bulan Desember tahun 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2022. Begitupula dengan Utang Barang dan Jasa yang berasal dari Utang pembayaran listrik dan Utang Jasa Tenaga Non ASN di Bulan Desember tahun 2022 yang dibayarkan di bulan Januari tahun 2023.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN OPD

4.1. Struktur Organisasi



4.2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
- b. Program generik :
 - 1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis.
 - 2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 3) Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

4.3 Sumber Daya

**GAMBARAN UMUM GOLONGAN PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN UMUM
PADA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

GOLONGAN PEGAWAI		PENDIDIKAN UMUM								JML	JENIS KELAMIN		JML	JABATAN FUNGSIONAL	
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3		L	P		JML	TERISI
Gol. IV	IV/e	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1
	IV/d	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1
	IV/c	-	-	-	-	-	3	7	1	11	3	8	11	11	11
	IV/b	-	-	-	-	-	1	13	4	18	8	10	18	15	15
	IV/a	-	-	-	-	-	4	26	-	30	13	17	30	21	21
	Sub Total	-	-	-	-	-	8	48	5	61	25	36	61	61	61
Gol. III	III/d	-	-	-	-	-	26	7	-	33	19	14	33	11	11
	III/c	-	-	-	-	1	8	8	-	17	6	11	17	11	11
	III/b	-	-	-	-	9	21	4	-	34	20	14	34	6	6
	III/a	-	-	-	1	1	14	-	-	16	7	9	16	1	1
	Sub Total	-	-	-	1	11	69	19	-	100	52	48	100	29	29
Gol. II	II/d	-	-	14	-	-	-	-	-	15	10	4	14	-	-
	II/c	-	-	4	-	-	-	-	-	3	4	-	4	-	-
	II/b	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	-	-	20	-	-	-	-	-	21	15	5	20	-	-
Gol. I	I/d	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	I/c	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	3	-	-
TOTAL		3	0	20	1	11	77	67	5	184	95	89	184	90	90

BAB V

PENUTUP

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai entitas pelaporan telah menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

